TAJUK RENCANA

Selamat Tinggal 2022, Selamat Datang 2023

SETAHUN lalu, bukanlah tahun yang mudah bagi perjalanan kita sebagai bangsa. Pandemi Covid-19 disebut sudah makin melandai, namun semua pihak tetap diminta waspada. Meski kini Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) telah dicabut, kewaspadaan tetap diberlakukan. Warga tetap diminta mengenakan masker. (KR, 31/12).

Kehidupan ekonomi belum pulih sepenuhnya, keluhan bahkan tangisan dari pelbagai sektor, tetap terdengar. Di tengah situasi seperti itu masih ada yang tega mengoyak negeri dengan kasus-kasus korupsi, terorisme hingga kasus Bupati Meranti 'mengancam pindahí ke negeri sebelah. Di sisi lain muncul isu-isu politik yang potensial untuk membelah bangsa. Mulai presiden tiga periode hingga penundaan pemilu.

Sesegera mungkin semua harus diakhiri. Jangan lagi merongrong bangsa dengan kejahatan luar biasa termasuk isu memecah belah. Dalam bahasa Muhammadiyah, kita harus menutup buku 2022 untuk menuju 2023 yang lebih baik. Bahkan menurut Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, tidak perlu lagi ada diskusi yang mengambangkan pelaksaan pemilu. Karena penetapan itu sudah menjadi komitmen negara, komitmen pemerintah secara prosedural. (KR 30/12).

Isu politik kebangsaan di tahun 2023 yang merupakan tahun politik, tentu berkait erat dengan Pemilu 2024. Dan kepastian pelaksanaan pemilu sebagaimana sudah ditetapkan menjadi sebuah keputusan dan komitmen bersama, harus dilakukan. Karena kepastian pelaksanaan pemilu sebagai kepastian politik itu akan menciptakan stabilitas yang penting bagi perjalanan bangsa. Apalagi stabilitas politik ini berjalin berkelindan dengan terciptanya stabilitas ekonomi.

Huntington (1991 :9) mengemukakan pemilihan umum yang bebas merupakan definisi minimal demokrasi, yang mengharapkan lahirnya tindakan politik atau perilaku politik sebagai bagian partisisipasi politik warga negara. Bisa dikatakan, pelaksanaan pemilu adalah implementasi dari sistem demokrasi secara sesungguhnya. Sepakat dengan yang disebut Haedar Nashir, tidak sekadar langsung umum bebas rahasia dan jujur adil (luber-jurdil) semata. Namun harus menjunjung tinggi nilai-nilai dan etika demokrasi. Di antara prinsip etika adalah tentang jaminan regulasi. Dan kepastian politik itu akan menciptakan stabilitas. Jika demokrasi terjaga secara prosedural, inilah modal besar Indonesia menjadi negara demokratis.

Modal besar Indonesia inilah yang harus dirawat demi keutuhan NKRI, tanpa harus berteriak-teriak sloganis yang kadangkala hanya *lips service*. Maka menjadi pas ajakan agar Bangsa Indonesia menutup buku 2022 agar perjalanan ke depan, memasuki 2023 tidak dibayang-bayangi ketakutan, kekhawatiran apalagi pesimisme. Biarkan buku 2022 menjadi catatan sejarah. Bukan untuk dihafal namun menjadi pelajaran agar kita tidak mengulang kesalahan yang sama. Sambut 2023 dengan optimism, hari depan akan lebih baik dari hari ini. Kita isi waktu setahun ini untuk mewujudkan diri sebagai negara besar yang demokratis.

Karena itu, hentikan berbagai macam pernyataan yang sifatnya spekulatif. Semua pihak harus bersedia dan mau menghilangkan ego masing-masing. Sementara elite politik, elite partai bahkan elite pemerintahan pun, harus bersikap sebagai seorang negarawan, yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, partai politik apalagi golongan. Kita ucapkan selamat tinggal 2022 dan selamat datang 2023. ❑-f

Menyambut Tahun Politik 2023

Paulus Mujiran

HARI ini kita sudah memasuki tahun 2023. Banyak orang menyebut tahun 2023 menjadi pintu masuk ke tahun politik. Secara harafiah sebenarnya tidak ada bedanya antara tahun baru biasanya dengan tahun baru di tahun politik. Sebutan tahun politik ingin menyebut tahun persiapan jelang pemilihan presiden dan pemilu legislatif.

Ada beberapa alasan yang menyebabkan tahun 2023 disebut tahun politik. Pertama, Februari 2024 menjadi ajang pemilihan legislatif (pileg) baik DPR, DPD, serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Masa setahun jelang Pemilu 2024 membuat suhu politik nasional meningkat. Hal ini dapat dimaklumi karena nuansa persaingan baik partai politik (parpol) maupun kandidat yang hendak mencalonkan diri baik sebagai kepala daerah, wakil rakyat maupun presiden/wapres mulai muncul ke permukaan.

Kedua, tepatnya November 2024 akan digelar pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung untuk provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia baik Gubernur, DPRD tingkat I, Bupati/Walikota dan DPRD tingkat II. Perhelatan ini merupakan peristiwa besar terutama di provinsi atau kabupaten/kota yang kepala daerahnya habis masa jabatan dan menggelar pilkada.

Kandidat

Semua kandidat yang hendak berlaga baik dalam pilpres, pileg maupun pilkada, pasti akan tampil melalui media luar ruang seperti baliho, pamflet, poster yang dipasang di tempat-tempat strategis agar dikenal calon konstituen. Disamping mereka menggunakan media-media modern seperti televisi, media sosial untuk menawarkan program dan merayu pemilih. Aura politik dipastikan memanas karena baik parpol maupun kandidat berlomba-lomba mencari dukungan yang tidak jarang memicu gesekan karena perbedaan pilihan.

Karena itu memasuki tahun politik yang dimulai 1 Januari 2023 kedewasaan politik perlu dikedepankan. Jadikan tahun 2023 sebagai momentum bagi semua komponen bangsa ini untuk mengedepankan etika dan keteladanan dalam berpolitik. Baik parpol maupun kandidat yang hendak berlaga jangan menjadikan rakyat sebagai objek dan pion-pion catur yang diambil suaranya pada saat pilkada dan pemilu namun aspirasinya tidak pernah benar-benar didengarkan.

Tunjukkan kepada rakyat mereka yang hendak berlaga adalah negarawan sejati yang berarti ëhidupnya keduniawian sudah selesaií dan tidak sekadar mengejar kekuasaan dan jabatan. Menjadi pemimpin dan wakil rakyat idealnya sudah tidak tergoda dengan halhal yang bersifat duniawi apalagi sekadar mengejar jabatan demi kekuasaan. Sebab kalau orientasinya adalah kekuasaan cenderung menghalalkan segala cara mencapai tujuan. Kekuasaan apapun jenjangnya adalah sarana melayani sesama dan memperjuangkan kepentingan publik.

Disamping itu, tahun politik semestinya secara politik menjadi ajang mendidik rakyat dengan contoh berdemokrasi secara benar. Menurut Haryatmoko (2022) hanya pemimpin yang berorientasi kerakyatan mampu berpolitik dengan santun. Tunjukkan kepada rakyat bahwa berdemokrasi yang benar membutuhkan sosok pemimpin yang benar-benar kapabel, kredibel atau dalam bahasa Jawa dikenal dengan pemimpin yang *bener, pinter lan pener*.

Mendidik Rakyat

Tahun politik mestinya tidak dimaknai sebagai persaingan yang membuat suasana gaduh, kacau dan panas. Namun merupakan tahun mendidik rakyat untuk semakin dewasa dalam berpolitik. Tidak perlu mempergunakan isu SARA, politik identitas, politik uang yang memecah belah persatuan bangsa karena pada ujungnya rasa benci dan dendam yang sudah terlanjur tertanam dalam masyarakat sulit hilang, pascapemimpin baru terpilih.

Ajarilah rakyat berdemokrasi yang benar. Mereka akan *legawa* begitu kandidat yang diusungnya kalah karena itulah hakikat dalam berdemokrasi. Mereka akan ikhlas belajar menerima kekalahan dengan santun. Sejatinya tahun politik adalah ajang belajar untuk berdemokrasi yang bijak dan mengedepankan etika dalam berpolitik. ❑-f

***) Paulus Mujiran SSos MSi,** *alumnus S-2 Undip, Ketua Pelaksana Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata Semarang).*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Euphoria Medsos Menyambut Pilpres 2024

Hari Santosa

MENARIK untuk dicermati, opini Masduki ëMengatur Konten Pilpres di Media Sosialí (KR 23/12). Opini tersebut mengatakan perlunya regulasi yang menarget para politisi yang berkontestasi. Termasuk partai politik, para influencer dan tentara digital serta pengelola platform.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, terdapat kendala untuk mengatur konten di media sosial (medsos). Pertama, keberatan masyarakat dengan dalih pembatasan kebebasan informasi yang dijamin Undang-undang. Kedua, beragamnya platform medsos yang dapat dipergunakan sehingga akan menyulitkan dalam hal pengawasan. Ketiga, peran masyarakat selaku penggembira dan tidak termasuk target regulasi tersebut namun secara aktif menyebarkan konten yang dibuatnya sendiri. Dan keempat, keterbatasan sumber daya manusia dari institusi yang berwenang melakukan pengawasan konten dibanding proyeksi percakapan aktif pengguna medsos di Indonesia.

Berkaca dari Pemilu 2020 di Amerika Serikat. Sebagai negara penganut demokrasi modern yang mempunyai banyak perusahaan penyedia platform medsos di dalamnya, carut-marut persoalan penggunaan medsos dalam konstestasi politik tidak dapat dihindarkan juga.

Paling Populer

Pilpres dengan segala dinamikanya adalah isu paling populer yang banyak dijadikan percakapan para pengguna medsos di Indonesia. Hal yang sama misalkan euphoria piala dunia sepak bola yang baru saja usai. Dengan jumlah pengguna lebih dari 191 juta, secara algoritma dapat dibayangkan betapa miliar lalulintas percakapannya. Dari hiruk pikuk kandidat, sepak terjang politiknya, terlebih nanti menjelang pelaksaan pemilu 14 Februari 2024.

Pesta demokrasi lima tahunan ini akan memunculkan euphoria politik di masyarakat yang dimanifestasikan dengan peningkatan signifikan jumlah percakapan di media sosial. Apapun konten yang dimunculkan, akan menjadi isu yang menarik untuk dibicarakan dan ëdigorengí.

Dengan kreativitas yang tinggi dan dukungan berbagai aplikasi di gawai mereka, menjadikan masyarakat sebagai kreator konten dadakan yang tidak perlu dibayar untuk isu-isu yang menarik perhatiannya. Apalagi munculnya medsos yang memberikan imbalan dari penyedia bagi pemiliknya berdasar jumlah penontonnya, seperti instagram, tik-tok, youtube dan masih banyak lainnya, menjadi pemicu masyarakat untuk membuat konten menarik. Meskipun mereka tidak menjadi pengelola platform, buzzer, pendukung salah satu kandidat capres atau pendukung partai politik tertentu.

Euforia politik di media sosial yang terjadi di masyarakat tersebut hendaknya difahami sebagai fenomena ketertarikan dan kegembiraan pesta demokrasi di Indonesia. Apabila dilakukan pembatasan secara ketat dimungkinkan akan menimbulkan gelombang penolakan dan mengurangi sukacita demokrasi.

Saring dan 'Sharing'

Belajar dari dampak hiruk pikuk medsos di Pilpres 2019 hingga muncul pembatasan akses medsos sesaat serta fenomena masuknya Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan dalam kabinet Joko Widodo, menyadarkan masyarakat bahwa kepentingan politik dapat dikolaborasikan dan tidak perlu dipertaruhkan berlebihan. Apalagi hingga kehilangan saudara dan korban jiwa. Maka, sosialiasi dan gerakan program ë Saring dan *Sharingí* perlu masif dilakukan. Guna menghindari berita hoaks yang bersifat provakatif dan berdampak negatif.

Dengan bekal kedewasaan politik dan peningkatan kesadaran masyarakat, secara signifikan akan menjadikan masyarakat semakin bijak dalam penggunaan media sosial menyambut Pilpres 2024. Kebebasan informasi yang ada, termasuk tentang politik, dapat disaring masyarakat dan diklasifikan apakah itu sekadar hoaks atau fakta yang sebenarnya. Apabila terdapat oknum yang menyalahgunakan media sosial, UU ITE dapat diterapkan secara efektif. ❑-d

***) Hari Santosa MBA**, *Alumni Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, pemerhati Manajemen (Cyber) Strategi Politik.*

PIKIRAN PEMBACA

Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik

Naskah dikirim Email atau WA

pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000

dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Mari Optimis di Tahun 2023

KITA sudah berada di tahun baru 2023. Tahun yang katanya akan suram karena resesi dunia. Tahun yang katanya penuh intrik karena menjadi tahun politik. Tahun yang katanya akan penuh cobaan, karena masih minimnya sikap kenegarawanan.

Apapun persoalan yang ada di tahun 2023, tetap harus dihadapi. Ibarat obat, mesti tetap ditelan sekalipun pahit, agar bebas dari rasa sakit. Dan sebagai orang beragama, kita tetap harus optimis mengayunkan langkah di tahun ini. Optimis, karena agama apa saja mengajarkan orang selalu berusaha dan mengajak untuk tidak pesimis apalagi putus asa.

Setelah aman memasuki tahun baru 2023, semoga kehidupan yang lebih baik juga akan terwujud di tahun yang penuh berkah ini. Mari terus berdoa dan berusaha. ❑-f

Ibu Wahyuningsih, Jl A Yani Magelang

Tergelitik Candaan Iwan Fals

SAAT menonton Old & New Years di salah satu televisi swasta yang menampilkan Iwan Fals, muncul dialog host Raffi Ahmad, Irfan Hakim yang bertanya pada Iwan Fals, siapa jago dalam Piala Dunia kemarin. Iwan Fals cepat menjawab : 'Jepang!'Semua spontan tertawa karena Jepang kemudian kalah.

Tetapi penjelasan Iwan kemudian membuat semua terdiam. 'Jepang memang kalah, tapi dalam kesemuanya termasuk penonton, mereka menang mengambil hati seluruh dunia. Dan tahukah? Ketika saya masih remaja, kesebelasan Jepang itu kalah lho dengan Indonesia. Kini mereka sudah sampai Piala Dunia'.

Saya tergelitik 'candaan' tersebut. Mengelus dada sendiri. Betapa Jepang memang luar biasa. Semangat mereka pantas ditiru. ❑-f

Agus S, Karangtengah Imogiri Bantul

Pojok KR

PPKM dicabut, warga diminta tetap pakai masker

-- Tidak perlu euphoria, tetap waspada

***

Menko PMK tengok kemiskinan ekstrem di Purbalingga

-- Jangan hanya ditengok pak....

***

Selama setahun, Indonesia diguncang 10.792 gempa

-- Risiko berada di- 'ring of fire'

Berabé

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. I**SSN:** 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisijanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB.
Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif . Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprapto, SPd, Wakil : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan - Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.